

## **BAB II**

### **BIOGRAFI SINGKAT IBNU TAIMIYAH DAN MOHAMMAD NATSIR**

#### **A. Biografi Ibnu Taimiyah**

##### **1. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah**

Pada kedua abad ketujuh Hijriah atau abad ketiga belas Masehi, di kala dunia Islam mengalami kemuduran, baik karena perpecahan intern sesama dinasti Islam sendiri maupun karena permusuhannya dengan bangsa Barat (Kristen), lahir seorang bayi laiki – laki yang kelak ditakdirkan Tuhan menjadi salah mufakkir (pemikir) Islam terkemukakan dan paling berpengaruh pada masanya. Bayi dimaksud adalah Ibnu Taimiyyah, tokoh muslim zaman silam yang oleh banyak orang disebut – sebut sebagai Mujaddid al-Islam (Pembaru Islam) (Muhammad Amin, 1991 : 7).

Taqiyudin bin Taimiyah lahir pada hari Senin, 10 Eani’ul Awal 661 Hijriah dalam lingkungan keluarga yang terkenal agamis. Ayahnya memberi dia nama “Ahmad Taqiyuddin”, kemudian diberi nama kiniyah dengan “Abil Abbas”. Namun akhirnya dia terkenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Namun itulah yang akhirnya terkenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Nama itulah yang akhirnya terkenal dikalangan

orang banyak sehingga nama aslinya terkalahkan (Syaikh Abdul Hasan Ali An-Nabawi, 1995 : 41).

Sedangkan dalam literatur yang lainnya disebutkan nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiy ad-Din Abu al-‘Abbas ibn asy-Syaikh Syihab ad-Din Abiy al-Mahasin ‘Abd al-Halim ibn asy-Syaikh Majdad-Din Abi al-Barakat ‘Abd as-Salam ibn Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Abi al-Qasim al-Khadlar ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Abdullah al-Mulaqqab ibn Taimiyah (Jeje Abdul Rojak, 1999 : 116).

Ibnu Taimiyah dilahirkan dikota Harran Mesopotamia Utara (termasuk wilayah Turki) sebagai seorang putra alim besar dalam mahzab Hanafi bernama Abu Muhammad Abd al-Halim ibn Abd al-Halim ibn Abd as-Salam al-Harrani (Jeje Abdul Rojak, 1999 : 118).

Pada masa itu, sekitar pertengahan tahun 667 H/1270 M tentara Mongol sedang menyerang negeri Harran dengan gencar – gencarnya, sehingga membuat keluarga besar Ibnu Taimiyah, termasuk kedua orang tuanya dan tiga orang saudaranya meninggalkan kota Harran menuju kota Damaskus dan kemudian menetap di kota tersebut. Ketika itu Ibnu Taimiyah baru berusia kurang lebih tujuh tahun. Peristiwa tragis yang menimbulkan kepanikan, penderitaan dan kesulitan dalam pengungsian ini sangat membekas dalam hatinya, sehingga tidak dapat dilupakan dalam ingatannya (Jeje Abdul Rojak, 1999 : 200 ).

Meskipun dalam suasana yang penuh dengan kekacauan dan kekerasan, keluarga besar Ibnu Taimiyah tidak lupa membawa serta dan memindahkan perpustakaan mereka yang sangat berharga sebagai satu – satunya warisan ilmiah. Mereka tidak ingin berpisah dengan buku – buku itu meskipun harus menanggung kepayahan dan kesulitan sebagai resikonya. Mereka membawa kekayaan yang paling berharga berupa buku – buku itu diatas gerobak dan keluar di tengah malam tanpa merasa takut kepada tentara Mongol (Syaikh Abu Hasan Ali An-Nadawi, 1995 : 42).

Ketika keluarga ulama besar tersebut sampai di Damaskus, langsung kabarnya tersebut kepada khalayak ramai. Para peminat ilmu di tempat itu memang telah mengenal nama Abil Barakat bin Taimiyah dengan segala perilakunya. Tidak berbeda halnya dengan Abdul Halim bin Taimiyah, ia juga telah dikenal keilmuan dan keutamaannya di kalangan mereka. Tidak lain, hal itu disebabkan Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah) pernah mengajar di perguruan Al-Amwi dan Darul Hadits As-Sukriyah. Bahkan dia menjadi rujukan para murid maupun ulama mazhab Hambali (Syaikh Abu Hasan Ali An-Nadawi, 1995 : 45).

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai anak yang rajin dan haus akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu selain mengaji kepada ayah dan pamannya, Ibnu Taimiyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka ketika itu, terutama yang ada di kota Damaskus dan sekitarnya (Muhammad Amin, 1991 : 9).

Damaskus pada waktu itu keamanannya cukup terancam karena selalu dibayang-bayangi serbuan serdadu Mongol, namun Ibnu Taimiyah dapat belajar lebih

tenang dibandingkan dengan situasi ketika ia studi di kota Harran. Kecuali itu Ibnu Taimiyah juga beruntung, karena selain sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, disamping Mesir, pada waktu itu Damaskus juga merupakan pusat para ulama besar dari berbagai mazhab atau aliran Islam yang ada pada masanya.

## 2. Kondisi Keberagamaan Umat

Setelah berperang melawan Tartar, Ibnu Taimiyah menyibukan diri untuk agama seperti biasanya, dan menganjurkan jihad dengan ajakan dan tindakan menghadapi berbagai bid'ah dan praktek – praktek ibadah baru yang digandrungi umat Islam dan dianggap sebagai bagian dari agama Islam.

Abad ketujuh Hijrah adalah abad yang tiada tandingannya dalam hal bid'ah. Walaupun, kala itu ditemukan banyak ulama dan mujtahid di bidang agama dan dakwah ajaran agama Islam tersebar luas, tapi jarang diantara mereka yang berusaha membrantas praktek-praktek kesyirikan, sampai Ibnu Taimiyah bertindak. Ibnu Taimiyah menulis beberap buku tentang bid'ah yang dilakukanya pada bulan-bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau menghentikan sembahyang-sembahyang yang diadakan seperti solat ragha'ib, shalat alfiyah dan lain sebagainya. Beliau menghabiskan altar – altar pemujaan dewa yang dipindahkan ke tempat – tempat ibadah oleh umat Islam karena kesalah fahaman mereka. Ibnu Taimiyah juga mengoreksi para darwish (pemimpin tarekat) yang mabuk – mabukan opium dan ganja, yang telah melanggar garis – garis hukum Tuhan dan jadi pusat persembahan masyarakat. Ia memberi garis batas antara mistikisme dan usaha – usaha magis serta

mengajarkan masyarakat agar mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan mengusir usaha taklid (ikut-ikutan) secara membabi buta pada orang – orang besar tertentu yang menjadi panutan, termasuk pada imam mazhab yang empat.

Pada saat itu Ibnu Taimiyah menyaksikan keberagaman umat yang sangat kacau, dimana ia menyaksikan kondisi umat Islam terbelunggu dengan paham – paham keagamaan yang beku (jumud), penuh dengan bid'ah dan khurafat yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai keterlaluan. Seperti ketika Ibnu Taimiyah menunaikan ibadah haji pada tahun 691 H/1293 M, di tempat tinggalnya, Damaskus, Ibnu Taimiyah menulis kitab Manasik al-Hajj untuk menentang berbagai macam bid'ah yang ditemuinya di tanah suci mekkah ( Jeje Abdul Rojak, 1999 : 127)

Dari sikapnya itu, maka sesungguhnya seluruh orientasi pemikiran keagamaan Ibnu Taimiyah difokuskan pada usaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Seperti ketika memberi batasan tentang agama Islam beliau mengatakan, agama Islam adalah agama yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun dasar – dasarnya yang terpokok adalah beribadah hanya kepada Allah semata – mata, dan beribadah kepada Allah harus menurut aturan yang telah disyariatkan oleh-Nya, bukan dengan bid'ah-bid'ah. Dasar – dasar pokok agama Islam ini dapat dirujuk pada firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110 : Barang siapa yang berharap menjumpai Tuhannya maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya ( Jeje Abdul Rojak, 1999 : 128 ).

Prinsip – prinsip diatas menurut Ibnu Taimiyah merupakan konsekwensi logis dari setiap muslim dalam rangka merealisasikan makna dua kalimat syahadat yang telah dia ikrarkan. Dalam syahadat pertama (syahadat tauhid) seorang muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang menyampaikan agama dari Allah yang mewajibkan kepadanya supaya membenarkan berita – berita yang disampaikannya dan menaati segala perintahnya (Jeje Abdul Rojak, 1999 : 128 ).

Ikrar dengan kedua syahadat tersebut dalam pandangan Ibnu Taimiyah menuntut adanya keterpaduan dan keserasian antara pernyataan lisan (ikrar bi al-lisan), membenaran atau keyakinan dalam hati (tasdiq bi al-arkan), dan perbuatan konkret pada anggota badan (amal bi al-arkan) seorang muslim dibawah bimbingan dan petunjuk rasul Allah. Menurutnya pula, Rasul Allah itu berfungsi sebagai perantara atau penengahan (wasithah) antara Allah sebagai al-Khalik dengan umat manusia sebagai al-makhluk dalam rangka penyampaian (tabligh) perintah dan larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya, hal – hal yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh-Nya dan seluruh ajaran yang dia sampaikan dari firman – firman-Nya (Jeje Abdul Rojak, 1999 : 128).

### 3. Karya – Karya Tulis

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa – masa terakhir ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang telah dihasilkannya.

Dilihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah agaknya tergolong sebagai salah seorang pengarang yang produktif yang sukar dicari padanya baik untuk yang semasa dengannya maupun dengan yang sebelum dan sesudah. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu yang sangat bernilai bagi generasi – generasi sepeninggalannya ( Muhammad Amin, 1995 : 32 ).

Di kalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya tulis Ibnu Taimiyah, namun perkiraan mereka menyebutkan kurang lebih berkisar antara 300 – 500 buah dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis (Thomas Michel, 1982).

Meskipun tidak semua karya tokoh ini dapat diselamatkan, berkat kerja keras ‘Abd ar-Rahman Ibn Muhamad Ibn Qasim dengan bantuan putranya Muhammad ibn ‘Abd ar-Rahman, sebagai karya Ibnu Taimiyah kini telah terhimpun dalam ‘Majmu’ Fatwa Ibn Taimiyah” yang berjumlah 37 jilid itu belum termasuk karangan – karangan Ibnu Taimiyah yang tergolong besar seperti “Minhaj as-Sunnah” dan lain – lain (Muhammad Amin, 1991: 32).

Karya – karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir – ilmu tafsir. Hadis – ilmu hadis, fiqh – usul al – fiqh, akhlak – tasawuf, mantik (logika) – filsafat, politik pemerintahan, tauhud/kalam, dan lain – lain. Sebagian dari buah penannya, seperti “Kitab Bugyah al-Murtad”, tampak bersifat polemis dan bernada panas. Itu bias dimengerti karena kitab – kitab tersebut dan lain – lain

karyanya yang sejenis, ia tulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar (Muhammad Amin, 1991 : 33)

Begitu banyak karya – karya Ibnu Taimiyah dan diantara karya – karya Ibnu Taimiyah yang telah berhasil dipublikasikan antara lain :

1. As – Siyasat asy – Syar’iyyat fi Ishlah ar Ra’l wa ar – Ra’iyyat. Beirut : Dar al – Kutubal – Ilmiyyat, 1409 H / 1988M.
2. Kitab ar-Radd ala al-Mantiqiyyin. Lahore : Idarat Tarjuman, 1976.
3. Al – Hisban fi al – Islam. Beirut : Dar al – Kutub al – Ilmiyyat, 1412 H /1992M.
4. Majmu’ ar-Rasa’il al kubra. Jilid I. Kairo : Maktabat al-Misriyat, 1323 H.
5. Majmu’ar – Rasa’il al Masa’il. Jilid V. T. P : al – Manar, t.th.
6. Minhaj as-Sunnat, Jilid I : Kairo : Maktabat Dar al – Urubat, 1962.
7. Ma’rifat al Musul ila Ma’rifat Anna Ushul ad-Din wa Furu’aha qad Bayyanaha ar-Rasul. T. P : 1318 H.
8. Minhaj as-Sunnat fi Naqd Kalam al Qadariyat. Beirut : Dar al – Kutub al – Ilmiyat, t. th.
9. Muwafaqat Shahih al Manqul li Sharih al Ma’qul. Beirut : Dar al - Kutub al – Ilmiyat, 1985 (Jeje Abdul Rojak, 1999 : 192 – 193).

Karya – karya ilmiah Ibnu Taimiyah yang jumlahnya tidak sedikit itu hingga dewasa ini masih dan akan terus dipelajari oleh ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kaum terpelajar di bergai negara. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika

konsepsi – konsepsi pemikiran Ibnu Taimiyah sedikit banyak mempunyai pengaruh cukup berarti bagi perkembangan pemikiran Islam dewasa ini.

## **B. Biografi Mohammad Natsir**

### **1. Riwayat Hidup Mohammad Natsir**

Ranah Minang atau Minangkabau pada awal abad ke – 20 dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tempat kelahiran tokoh – tokoh Islam ternama. Mereka menjadi tokoh – tokoh besar nasional dalam bidang politik, intelektual, oendidikan, maupun keagamaan. Nama – nama seperti Imam Bonjol, Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Hamka, Mohammad Natsir dan lain – lain, semuanya berasal dari Minangkabau, Sumatra Barat (Thohir Luth, 1999 : 21).

Mohammad Natsir, sebagaimana orang Minangkabau pada umumnya bergelar setelah menikah, maka Natsir pun memiliki gelar yang diberikan keluarganya pada saat ia menikah yaitu Datuk Sinaro Panjang (Yusuf A, 1978 : 4), terlahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat pada hari Jumaat tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, bertepatan dengan 17 Juli 1908 dari seorang wanita yang bernama Khadijah. Ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Saripado, seorang pegawai rendahan yang pernah menjadi juru tulis di kantor Kontroler di Maninjau.

Pada tahun 1918, ia dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sebagai sipi (penjaga tahanan) (Thohie Luth, 1999 : 22).

Di tempat kelahiran itu, Mohammad Natsir melewati masa – masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Natsir melewati menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama dengan tekun pada beberapa alim ulama. Pada umumnya yang kedelapan belas tahun (1926), Natsir berkeinginan masuk sekolah rendah Belanda (HIS). Keinginan tersebut tidak dapat terlaksana karena ia anak pegawai randahan. Akhirnya Natsir memasuki sekolah pertikelir HIS Adabiah di Padang (Thohir Luth, 1999 : 23).

Selama lima bulan pertama di Padang, ia melewati kehidupan dengan perjuangan berat. Natsir memasak nasi, mencuci pakaian sendiri, dan mencari kayu bakar di pantai. Kehidupan yang berat tersebut dilalui dengan senang hati. Keadaan ini, menurut M. Natsir, menimbulkan kesadaran bahwa rasa bahagia tidaklah terletak pada kemewahan dan keadaan serba cukup. Rasa bahagia lebih banyak timbul dari kepuasan hati yang tidak tertekan dan bebas, berani mengatasi kesulitan – kesulitan hidup, tidak mengalah terhadap keadaan, tidak berputus asa, dan percaya kepada kekuatan yang ada pada diri sendiri (Yusuf A, 1978 : 4). Kemudian Natsir dipindahkan ke HIS Pemerintah di Solok oleh ayahnya setelah beberapa bulan sekolah di Padang. Natsir dapat langsung duduk di OI atas pertimbangan kepintarannya. Di Solok inilah ia pertama kali belajar bahasa Arab dan mempelajari hukum fikih kepada Tuanku Mudo Amin yang dilakukannya pada sore hari di

Madrasah Diniyah dan mengaji Al-Qur'an pada malam harinya (Deliar Noer, 1996 : 100).

Disamping belajar, Natsir juga mengajar dan menjadi guru Bantu kelas 1 pada sekolah yang sama. Di HIS itu, sebagaimana umumnya sekolah Belanda, disiplin pribadi yang ketat, tuntutan belajar yang keras, guru – guru yang tegas dan dedikatif dialami Natsir. Payah memang belajar dalam sistem pendidikan Belanda. Namun sistem pendidikan demikian justru berhasil membentuk karakter pribadi Natsir yang menjunjung tingginya etika kerja, ulet, dedikatif, memiliki integritas dan teguh memegang prinsip hidup (Ahmad Suhelmi, 1999 : 22 – 23).

Setelah lulus dari HIS tahun 1923, Natsir melanjutkan kajiannya ke MULO (*Middlebare Uitgebreid Large Onderwys*) di kota Padang. Di masa itu siapapun yang bisa melanjutkan studi ke MULO tentulah bukan orang lain. Setidaknya ia orang yang terpandang dalam masyarakat, memiliki kapasitas intelektual memadai dan pasti mampu berbahasa Belanda dengan baik. Jauh di atas rata – rata kaum inlander (bumi putera), diterimanya Natsir di sekolah itu karena ia memiliki kelebihan – kelebihan itu. Dengan menjadi siswa MULO, pemahaman Natsir tentang sistem kolonial termasuk wataknya yang diskriminatif jauh lebih baik dari ketika ia masih sekolah di HIS Solok (Ahmad Suhelmi, 1999 : 24).

Pada tahun 1927 Natsir pergi ke Bandung untuk melanjutkan kajian formalnya ke AMS (*Algemene Middlebare School*). Di sekolah ini ia mulai menekuni ilmu pengetahuan Barat, lebih tekun dari masa – masa sebelumnya. Natsir

mempelajari berbagai aspek sejarah peradaban Islam, Romawi, Yunani, dan Eropa, melalui buku – buku berbahasa Arab, Perancis, dan latin (Ahmad Suhelmi, 1999 : 24).

Jadi, dalam usahanya yang relative belia (21 tahun) Natsir telah menguasai lima bahasa asing (Belanda, Arab, Inggris, Perancis dan Latin).dan dua bahasa daerah (Minangkabau dan Sunda). Penguasaanya atas bahasa – bahasa itu sangat memungkinkan Natsir melakukan penjelasan intelektual yang nyaris tanpa batas dn membentuknya menjadi manusia cosmopolitan (Ahmad Suhelmi, 1999 : 24).

#### 1. Kondisi Keberagaman Umat

Pola keagamaan yang dominan ketika Islam memasuki kepulauan Indonesia antara abad ke – 13 dan abad ke – 17 merupakan campuran antara dinamisme pagan dan mitisisme yang ditentukan dari atas terhadap selama masa agama Budha dan Hindu. Animisme menentukan ekspresi terutama di dalam pemujaan roh yang mengakui adanya roh – roh dalam orang – orang yang hidup, orang yang mati dan dalam benda – benda mati. Selama agama Hindu dan agama Budha berpengaruh di kepulauan ini, yaitu antara abad ke – 19 dan abad ke – 13, kepercayaan animistik ini hidup dalam bentuk yang lembut dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap agama – agama yang baru. Praktek – praktek Hinduistik, khususnya praktek – praktek aliran Siwaisme, dan Budha Mahayana, yang memasuki kepulauan nusantara melalui pertukaran dengan India dan Malaya, pada umumnya sukses karena menyatu dan beradaptasi dengan kepercayaan – kepercayaan keagamaan pribumi.

Petunjuk – petunjuk wayang tradisional dan orchestra – orchestra gamelan, yang mengembangkan ikatan – ikatan mereka yang kuat dengan praktek – praktek mistik dan mitologi Hindu selama periode ini, terus merefleksikan nilai – nilai Jawa dan memantulkan pandangan Jawa mengenai kehidupan (Howard M, 1996 : 1-2).

Banyak praktek keagamaan pribumi terus berlangsung setelah kedatangan Islam, beberapa secara terbuka, tetapi pada umumnya dibungkus sebagai bagian dari Islam itu sendiri (Howard M, 1996 : 2). Bahwa Islam berkompromi dengan pola – pola keagamaan yang ada ketika diperkenalkan ke nusantara tidaklah mengherankan karena umat Islam sendiri dikenal umat yang sangat menghargai perbedaan.

Demikianlah situasi keagamaan yang terjadi di Indonesia pada masa – masa awal menuju kemerdekaan Indonesia, dimana banyak terjadi penggabungan – penggabungan antara praktek – praktek agama yang sesuai dengan kitab suci dengan praktek – praktek masyarakat yang merupakan suatu kegiatan adat atau kebudayaan semata. Hal seperti ini sering disebut sebagai perbuatan – perbuatan yang mendekati bid'ah dan khurafat yang tidak ditentukan oleh agama Islam.

Melihat kondisi keberagaman umat yang sangat mengkhawatirkan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dengan mengeluarkan banyak tulisan dan anjuran – anjuran yang konkret, Mohammad Natsir pun melakukan hal yang sama.

Menurut beberapa literatur, gerakan wahabi di Sumatra Barat merupakan gerakan Islam pertama yang menyeruhkan agar umat Islam kembali pada Al – Qur’an dan As Sunnah sebagaimana yang diterapkan di dunia Arab pada masa – masa awal penyebran agama Islam. Gerakan wahabi ini diperkenalkan pertama kali oleh pencetusnya Muhammad Ibn Abdul Wahab (Iman Muhammad Abu Zahrah, 1996 : 251).

Wahhabiyah muncul di gurun Arab sebagai reaksi terhadap sikap pengkultusan dalam bentuk mencari keberktaan dari orang – orang tertentu serta mendekati diri kepada Allah melalui ziarah ke kubur mereka, disamping terhadap bid’ah yang telah mendominasi berbagai tempat keagamaan dan aktivitas duniawi. Wahhabiyah dating guna melawan semua penyimpangan ini dan menghidupkan kembali mazhab Ibn Taimiyyah (Imam Muhammad Abu Zahrah, 1996 : 250 – 251).

Gencarnya pengaruh paham Wahabi yang di bawa oleh orang – orang Minangkabau sepulangnya dari Timur Tengah, sedikit banyak mempengaruhi pemikiran keagamaan Mohammad Natsir, sebab sebagaimana telah dijelaskan di muka, Mohammad Natsir telah mendapatkan pendidikan agama Islam dari usia dini, sehingga hal ini tentu sangat membekas dalam pikirannya.

Kemudian setelah ia merantau ke pulau Jawa, pengetahuannya tentang agama Islam semakin bertambah, apalagi ia bergabung dengan perhimpunan Jong Islamiten Bond (JIB) di bawah bimbingan Haji Agus Salim, salah seorang ulama besar yang berasal dari ranah Minang juga. Pada dasarnya selain untuk menngkatkan

pemahamannya terhadap organisasi dan politik pada umumnya, tujuan Mohammad Natsir bergabung dengan JIB adalah juga dikarenakan adanya rasa keprihatinannya yang sangat dalam terhadap pengaruh – pengaruh budaya barat dikalangan terpelajar atau kaum muda Indonesia serta adanya perbuatan – perbuatan bid'ah dan khurafat yang dilakukan segolongan kaum tua khususnya yang tinggal di pedalaman pulau Jawa, dimana suka mempraktekan kegiatan – kegiatan keagamaan yang berada di luar syariat Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Semasa tinggal di Bandung, Natsir juga belajar pada tokoh ulama Persis (Persatuan Islam), Ahmad Hassan (Ahmad Suhelmi, 1999 : 29). Persatuan Islam resmi dibentuk tanggal 12 September 1923 oleh sekelompok Muslim yang menaruh perhatian pada kajian dan kegiatan keagamaan. Ide pendirian organisasi ini yang paling utama adalah “reformasi Islam”, yaitu, mengembalikan pemahaman umat Islam kepada Qur'an dan Hadist. Apabila diperhatikan secara mendalam maka tujuan organisasi ini hampir sama atau bahkan sama dengan gerakan Wahabi yang diperkenalkan Muhammad Abdul Wahab di Timur Tengah, yaitu membangkitkan kembali pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan untuk selalu berpegang teguh pada Qur'an dan Hadist. Jadi apabila di tarik suatu benang merah, maka akan tampak adanya sambungan atau hubungan atau kelanjutan pemikiran tentang Islam dari Ibnu Taimiyah sampai dengan Mohammad Natsir. Bahkan sampai saat ini pun seruan – seruan untuk kembali kepada Qur'an dan Hadist akan selalu dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.

Pada dasarnya yang sangat merisaukan pemikiran Natsir tentang keberagamaan umat Islam pada saat itu bukan hanya sekedar masalah bid'ah dan khurufat saja, tetapi adanya pengaruh budaya barat yang dibawah oleh penjajah Belanda juga cukup mengkhawatirkannya, apalagi ditambah adanya upaya – upaya kristenisasi yang dilakukan oleh pihak penjajah Belanda, baik secara sembunyi – sembunyi maupun secara terang – terangan.

Oleh karena itu sebagaimana yang pernah dilakukan Ibnu Taimiyah, Mohammad Natsir melakukan hal yang serupa, yaitu membangkitkan kesadaran umat Islam untuk berpegang teguh kepada Qur'an dan Hadist melalui tulisan – tulisan ataupun tindakan – tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari – hari.

### 3. Karya – karya Tulis

Sebagaimana Ibnu Taimiyah, Mohammad Natsir juga merupakan seorang tokoh intelektual yang termasuk rajin menulis. Sebagai seorang intelektual, Natsir termasuk sebagai orang yang sangat produktif untuk mewujudkan gagasan maupun pikirannya dalam bentuk karya tulis yang ilmiah. Menurut salah seorang penyunting tulisan – tulisannya D.P Sati Alimin dalam periode 1936 – 1941, Natsir menulis tak kurang dari 90 karangan. Karangan – karangan Natsir tersebut sebagian besar kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku. Selama hidupnya ia menulis lebih dari 20 buku tebal dan tipis yang dituliskan dalam bahasa Indonesia, Belanda, Inggris dan Arab (Ahmad Sabiq, 2000).

Buku – buku M. Natsir yang berkaitan dengan pemikiran politiknya dan menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut ( Skripsi Ahmad Sabiq, 2000 ) .

1. *Capita Selecta I* (Jakarta : Bulan Bintang, 1954) dan *Capita Selecta II* (Jakarta : Pustaka Medis, 1957). Buku yang merupakan kumpulan karangan – karangannya itu berbicara tentang soal – soal kebudayaan, filsafat, pendidikan, agama, ketatanegaraan dan kemasyarakatan.
2. *Agama dan Negara*, sumbangan karangan untuk buku *Falsafah Perjuangan Islam* (Medan : Saifah, 1951). Berisi uraian Natsir tentang hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam.
3. *Islam Sebagai Ideologi* (Djakarta : Penyiaran Ilmu, 1951). Isinya hampir sama dengan “Agama dan Negara”, hanya pada bagian akhir tulisan Natsir memberikan tambahan sekitar dua halaman.
4. *Islam sebagai Dasar Negara* (Bandung : Fraksi Masyumi dalam konstituante, 1954). Berisi uraian Natsir mengenai penolakannya terhadap paham sekulerisme dalam kehidupan kenegaraan dan kritiknya atas penafsiran sekularistik terhadap Pancasila serta wartawannya mengenai dasar agama dalam bernegara.
5. *Indonesia di Persimpangan Jalan* (Jakarta : t.p., 1984). Berisi koreksi Natsir terhadap kebijakan pemerintahan Republik Indonesia, terutama mengenai RUU 5 paket undang – undang di bidang politik.

6. Tempatkan Kembali Pancasila pada Kedudukannya yang Konstitusional (Jakarta : t.p., 1985). Isinya tentang upaya menjaga kemurnian Pancasila sebagai titik pertemuan dan pemersatu bangsa.
7. Demokrasi di Bawah Hukum (Jakarta : Media Dakwah, 1986). Isinya tentang kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat menurut undang – undang negara yang dianggapnya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Selain karya – karya yang telah disebutkan di atas, masih banyak karya tulis Mohammad Natsir yang berbentuk buku tebal dan tipis. Dalam suatu karyanya Dr. Tohir Luth mengelompokkan karya tulis Natsir menjadi empat kategori (Thohir Luth : 15 – 19).

### **C. Pemikiran Politik dan Pemerintahan**

Untuk melihat pemikiran politik dan pemikiran pemerintahan baik Ibnu Taimiyah maupun Mohammad Natsir maka terlebih dulu penulis menyampaikan ureian berikut ini.

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut di bawah ini:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal

Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya “*Government*” Perancis menyebutnya “*Gouvernement*” keduanya berasal dari perkataan Latin “*Gubernaculum*” yang biasa sekarang kita sebut dengan “*Gubernur*”. Dalam bahasa Arab disebut dengan “*Hukumat*” di Amerika Serikat disebut dengan “*Administration*” sedangkan Belanda mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

Jadi “*Regeren*” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan “*Bestuur*” diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Akan halnya pemerintahan yang dibahas dalam ilmu pemerintahan, berikut ini akan disampaikan berbagai pendefinisian tentang pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

Menurut D.G.A. Van Poelje (1953 : 1)

*De Bestuurkunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt.*

Maksudnya ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut U. Rosenthal (1978 : 17)

*De Bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interne en externe werking van de structuren en processen.*

Maksudnya ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut H. A. Brasz (1975 : 1)

*De Bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare diens is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers.*

Maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Menurut W.S. Sayre (19 : )

*Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority.*

Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai oprganisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut C.F. Strong (1960 : 6)

*Government in the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the mean's making lows, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defendingof state and of enforcing the low it makes on the state's behalf.*

Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Robert Mac Iver (1960 : 5 )

*Government is the organization of men under authority ... how man can be govern .*

Maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Jadi bagi Mac Iver Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how man are governed*).

Menurut Woodrow Wilson (1924 : 9)

*Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two or a few men, or many men, or of a community prepared by organization to realize its own purpose with reference to the common affairs of the community .*

Maksudnya pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat. Sekelompok.

Menurut David Apter (1977 : 10)

*Government is most generalized membership unit possessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power .*

Maksudnya pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2002 : 10)

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan .

Menurut Charles Merriam (1960 : 11)

Tujuan pemerintah meliputi *external security, internal order, justice, general welfare, dan freedom.*

Menurut Samuel Edward Finer (1974 : 3-4)

Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara ,

metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Musanef (1985 : 7)

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Soemendar (1985 : 1)

Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Bayu Suryaningrat (1985 : 1)

Disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum Masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal , diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1984 : 19)

Tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Menurut Kitab Suci Al; Quran (3 : 104)

(Pemerintahan adalah) segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran , melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Maksudnya adalah antara kebenaran dan kebaikan harus diseimbangkan (*wasathan, balancing, evenwichtigheid*) karena ada pemerintah yang baik (*good governance*) tetapi malahan melindungi pedagang kaki lima berjualan di jalan protokol sehingga kotor, sedangkan pemerintah yang benar dalam pembersihannya (*clean government*) lalu mengusir pedagang kaki lima dari jalan protokol sehingga dzalim dan menimbulkan keresahan, untuk melarang dari yang buruk pemerintah harus mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Sehingga dibentuklah kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, Sedangkan yang dimaksud dengan mengajak kepada kebaikan (*amar makruf*) untuk melindungi fakir miskin dibentuklah dinas

sosial, departemen agama dan lain lain. Yang dimaksud dengan mencegah dari keburukan (*nahi mungkar*) adalah kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi perjudian, pelacuran, pencurian dan dekadensi moral lainnya.

Dari keseluruhan definisi tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

#### **D. Hubungan Politik dengan Pemerintahan**

Ibaratkan panggung sandiwara maka sebelum main drama para pemain dipimpin oleh sutradara mencari input kepada para pemain apa hal yang akan membahayakan dalam pementasan, maka ini merupakan masukan yang berharga dalam kehidupan teater pertunjukkan, begitu pula aparat legislatif mencari masukan dalam masyarakat apa yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk undang undang pada tingkat nasional tetapi agar tidak separatism aka dalam bentuk

peraturan daerah bagi tingkat propinsi dan kabupaten, yang dahulu disebut daerah tingkat I dan tingkat II.

Karena pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan tidak menutup kemungkinan berbuat sewenang wenang dalam kekuasaan tetapi sebaliknya dalam hal pelayanan terjadi pilih kasih maka dibuatlah oleh para wakil rakyat yang bermula dari pembentukan partai politik yang kemudian setelah memenangkan pemilihan umum lalu menjadi anggota parlemen. Selain membuat peraturan anggota legislatif ini juga mengawasi perilaku pemerintahan karena sadar bahwa harta benda kekayaan bumi adalah milik rakyat banyak yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, untuk itu anggota legislatif harus banyak komentar dengan sebutan “Parle” artinya bicara.

Dengan demikian para anggota legislatif mengerjakan input sistem politik sedang para aparat aparat eksekutif menjalankan apa yang menjadi output sistem politik dalam bentuk peraturan perundang undangan (Inu Kencana, 2014:82).